

POLITIK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL: STUDI KASUS PENGEMBANGAN UMKM BATIK GEBLEK RENTENG DI KABUPATEN KULON PROGO

Mahmuddin Sirait

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Palangka Raya

Email: mahmuddin.sirait@fisip.upr.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses berjalannya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui program UMKM batik geblek renteng di Kabupaten Kulon Progo. UMKM batik geblek renteng adalah salah satu dari program Bela Beli Kulon Progo yang tujuan utamanya adalah untuk menuntaskan kemiskinan di Kulon Progo. Tetapi, dalam pengembangannya, terdapat berbagai permasalahan dalam pengembangan UMKM batik geblek renteng seperti adanya batik geblek renteng printing, batik geblek renteng kurang diminati konsumen, dan berbagai permasalahan lainnya. Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan tersebut, riset ini dipandu oleh Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal dan politik Pengembangan Ekonomi Lokal. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatan. Ada beberapa temuan yang dihasilkan pada penelitian ini. *Pertama*, lahirnya UMKM batik geblek renteng disebabkan oleh minimnya dukungan pemerintah sebelumnya terhadap pemberdayaan UMKM batik di Kulon Progo sehingga mendorong pemerintah baru untuk mengembangkan UMKM batik yang disebut dengan batik geblek renteng. *Kedua*, UMKM batik geblek renteng lebih dominan digunakan untuk kepentingan Birokrat Kulon Progo, elit pengrajin batik Kulon Progo, dan Bupati Kulon Progo.

Kata Kunci: pengembangan ekonomi lokal ; politik pengembangan ekonomi lokal ; kepentingan elit.

Abstract

This research aims to understand the process of Local Economic Development in the case of batik geblek renteng development in Kulon Progo District. Batik geblek renteng is one of the Bela Beli Kulon Progo programs which its basic purpose solves the poverty in Kulon Progo. Nevertheless, there were various problems in the development of batik geblek renteng such as some craftsmen produced batik geblek renteng with printing, consumers were not interested in batik geblek renteng's motif, etc. To analyze the problems, this research was guarded by the concept of Local Economic Development and politics of Local Economic Development. This study used qualitative methods with case study as an approach. There are several findings in this research. First, batik geblek renteng arose because of less support from previous government in empowering batik in Kulon Progo. This encouraged new head of Kulon Progo District to develop batik called batik geblek renteng. Second, Batik geblek renteng was more dominant used for the interests of bureaucrats, elites of batik craftsmen, and the Head of Kulon Progo District.

Keywords: local Economic development ; politics of local economic development ; elite interests.

1. PENDAHULUAN

Berlakunya otonomi daerah menimbulkan implikasi bagi daerah (kabupaten/kota) untuk mengeluarkan dan membangun kemampuannya dalam memobilisasi serta mengelola produksi, alokasi, dan distribusi, berbagai sumberdaya yang dimilikinya menjadi produk unggulan yang memiliki keunggulan daya saing, baik untuk pasar lokal, regional, bahkan internasional. Untuk itu, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Strategi pengembangan wilayah yang bertumpu pada sumberdaya lokal ini dikenal sebagai konsep pengembangan ekonomi lokal (Blakely dalam Nel 2001, Adisasmita 2005, Arsyad 2005).

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik demi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal (Murphy, et.al 2006). Disamping itu, PEL menekankan kebijakan pembangunan pribumi dengan sebanyak mungkin menggunakan aspek lokalitas dalam pembangunan. Aspek tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan aspek kelembagaan (Blakely dalam Nel, 2005).

Pendekatan konsep PEL ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk berperan dan berinisiatif dalam menentukan dan mengolah sumberdaya lokal untuk menciptakan mata rantai perekonomian. Pengembangan ekonomi yang bertumpu pada sumberdaya lokal seperti ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal dan menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada meningkatnya perekonomian lokal, sehingga mampu bersaing dengan wilayah disekitarnya untuk mengurangi adanya disparitas wilayah.

Kulon Progo merupakan sebuah kabupaten yang membangun perekonomiannya melalui sebuah gerakan yang dinamakan Bela-Beli Kulon Progo. Bela-Beli Kulon Progo adalah semangat pembelaan yang ditunjukkan oleh seluruh warga Kulon Progo dengan sebisa mungkin membeli produk lokal yang diproduksi di Kulon Progo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program Bela-Beli Kulon Progo secara prinsip mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 sebagaimana tertera pada pasal 7 poin (c), *“mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industry, dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat”*

Salah satu fokus dari program Bela-Beli Kulon Progo adalah pengembangan batik khas daerah yang disebut dengan batik geblek renteng. Batik geblek renteng terpilih sebagai pemenang dalam perlombaan desain batik pada awal kepemimpinan Hasto Wardoyo atau akrab dipanggil dengan Hasto (Bupati Kulon Progo) di tahun 2012. Batik ini agak unik karena motif utamanya berbentuk angka delapan. Melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 025/2171 Tahun 2012, Hasto mewajibkan Pegawai Negeri Sipil, Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kepala Desa, Perangkat Desa, dan seluruh siswa/siswi dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di lingkungan Kabupaten Kulon Progo untuk memakai seragam batik geblek renteng. Selama ini

masyarakat setempat hanya dengan suka rela membeli batik di Kulon Progo. Tetapi dengan kebijakan ini, akan ada akumulasi ekonomi mengingat terdapat sekitar 80 ribu pelajar dan 8 ribu PNS di Kulon Progo.

Misalkan saja, jika 30% dari 80 ribu pelajar di Kabupaten Kulon Progo membeli batik geblek renteng setiap tahunnya, maka akan ada sebanyak 24 ribu pelajar yang membeli batik geblek renteng setiap tahun. Jika setiap pelajar membutuhkan satu meter kain, maka dalam satu tahun akan terjadi pertumbuhan kain sebanyak 24 ribu meter. Jika harga satu meter kain adalah Rp. 30.000,00, maka dalam satu tahun akan menghasilkan Rp. 720.000.000,00.

Disamping mewajibkan seragam batik, Pemerintah Kulon Progo juga mendukung para pengrajin lokal dengan membuat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). HAKI dibuat untuk melindungi hak cipta batik geblek renteng sehingga batik tersebut tidak boleh diproduksi di luar Kulon Progo. Produksi batik geblek renteng hanya boleh dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di Kulon Progo. Selain itu, batik geblek renteng hanya boleh ditulis dan dicap agar semua pengrajin mendapatkan porsi yang sama sesuai dengan kemampuan mereka. Dukungan lain adalah terkait dengan peralatan membatik, pelatihan pembukuan keuangan, dan teknik membatik yang berasal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo. Begitu pula yang dilakukan oleh Dinas UMKM dengan melibatkan pengrajin batik pada berbagai pameran untuk mempromosikan batik geblek renteng.

Dengan berbagai promosi dan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kulon Progo dengan masyarakat setempat, pendapatan batik geblek renteng tidak hanya didapatkan dari masyarakat Kulon Progo, tetapi juga didapatkan dari masyarakat di luar Kulon Progo. Salah satu diantaranya adalah Pemerintah Daerah Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang tertarik dan datang langsung ke Kabupaten Kulon Progo untuk belajar membatik dan membeli batik geblek renteng (Nariswari 2016).

Meskipun demikian, terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan batik geblek renteng. Hal ini terjadi karena adanya berbagai kepentingan diantara stakeholder dalam mendapatkan keuntungan maupun mendapatkan dukungan elektoral. Untuk mendapatkan keuntungan maksimal, beberapa elit pengrajin batik Kulon Progo memproduksi batik geblek renteng printing di Kulon Progo. Tentu saja hal tersebut akan menghancurkan pendapatan pengrajin kecil yang hanya bisa menghasilkan beberapa potong batik geblek renteng dalam sehari. Pemerintah Kulon Progo yang pada awalnya melarang produksi batik geblek printing, tidak memberikan sanksi kepada elit pengrajin batik yang memproduksi batik geblek printing.

Selain itu, ada oknum yang bekerja di bagian pemerintahan Kulon Progo menjadi pengrajin batik secara tiba-tiba yang kemudian juga mengambil alih Asosiasi Pengrajin dan Pedagang Batik Kulon Progo (APPBK) dan berperan sebagai ketua asosiasi tersebut. Padahal, pada awalnya asosiasi tersebut hanya untuk pengrajin dan pedagang batik. Hal lain yang menarik adalah geblek renteng berbentuk angka delapan yang mempunyai kesamaan dengan makna nama Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo. Dalam bahasa Jawa, kata "HASTO" artinya adalah delapan. Dalam perkembangannya, angka delapan tersebut tidak

hanya tertera pada batik khas Kulon Progo, namun pada berbagai tempat umum seperti gapura, halte bus, vas bunga jalan, dinding sekolah, bahkan di kantor Bupati Kulon Progo.

Dengan melihat fenomena yang telah dijelaskan, tulisan ini akan membahas lebih mendalam mengapa UMKM batik geblek renteng muncul dan bagaimana pengembangannya di Kabupaten Kulon Progo. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses berjalannya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui program UMKM batik geblek renteng di Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dihimpun peneliti, topik mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal sudah cukup banyak. Tetapi topik ini lebih banyak dibahas dalam perspektif ekonomi dan implementasi kebijakan. Adapun penelitian yang mengaitkan Pengembangan Ekonomi Lokal dengan perspektif politik, masih belum cukup mendalam dibahas. Salah satu penelitian yang membahas PEL dari perspektif politik adalah tesis yang berjudul *Upaya Peningkatan Daya Saing Pasar Terapung Muara Kuin Sebagai Modal Pengelolaan Local Economic Development*. Pahlawan (2014) meneliti tentang bagaimana pengembangan daya saing Pasar Terapung Muara Kuin melalui pengelolaan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Hasil studi Pahlawan menunjukkan bahwa daya saing Pasar Terapung Muara Kuin mengalami penurunan padahal objek ini merupakan industri pariwisata yang besar. Menurunnya eksistensi tersebut disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap destinasi tersebut. Tesis Pahlawan belum melihat persoalan PEL dari sisi politik. Pahlawan hanya melihat permasalahan PEL dari segi kebijakan pemerintah yang tidak memaksimalkan strategi PEL.

Penelitian lain ditulis oleh Luly (2009) dengan judul *Pelebagaan Local Economic Development: Studi Kasus Program Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (BPEM) di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Tesis Luly membahas tentang bagaimana aplikasi semangat PEL dalam Program BPEM Kabupaten Kupang. Hasil dari penelitian Luly menunjukkan bahwa aplikasi semangat PEL dalam BPEM di Kabupaten Kupang lebih dominan pada semangat pemberdayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Luly juga belum menjelaskan tentang kompleksitas PEL dari sisi politik.

Tulisan Chazali (2017) dalam Buku bunga rampai dengan judul *Mengembangkan Institusi Ekonomi Perdesaan: Belajar dari Pengalaman*. Tulisan Chazali membahas tentang problematika Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Hasil dari penelitian Chazali menunjukkan bahwa Poktan dan Gapoktan tidak banyak yang solid dan benar-benar mawadahi kebutuhan petani (terutama petani kecil). Hal ini terjadi karena dinamika Poktan dan Gapoktan mencerminkan struktur kuasa, hierarki, dan ketimpangan yang ada pada masyarakat sekitarnya. Penelitian Chazali membahas problematika PEL dikarenakan oleh elit yang berkuasa di tingkat lebih kecil. Sementara itu, penulis akan melihat problematika PEL dari sisi masing-masing kepentingan elit, termasuk bupati.

Dari kajian literatur yang telah disampaikan, penulis melihat bahwa belum banyak persoalan politik yang dibahas dalam PEL. Kalaupun ada, tetapi masih belum mendalam. Melihat kondisi tersebut, penulis merasa bahwa persoalan-persoalan politik dalam PEL perlu ditelaah lebih mendalam lagi.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan Politik PEL

Untuk melihat PEL dalam pengembangan UMKM batik geblek renteng, penelitian ini menggunakan konsep Murphy, et.al (2006). Murphy et.al (2006) mendefinisikan PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di tingkat lokal. Definisi ini sesuai dengan pengembangan UMKM batik geblek renteng yang melibatkan pemerintah (Bupati Kulon Progo, Dinas Perdagangan, dan berbagai dinas terkait), usahawan (pengrajin batik), dan organisasi non pemerintah (masyarakat Kulon Progo).

Untuk melihat politik PEL dalam pengembangan UMKM batik geblek renteng, tulisan ini menggunakan konsep Elkin (dalam Wolman dan Spitzley, 1996) yang menyatakan bahwa pejabat kota menggunakan PEL untuk kepentingan elektoral. Hal ini dapat dilihat dari kemenangan Bupati Kulon Progo (Hasto Wardoyo) pada pemilihan kembali Bupati Kulon Progo tahun 2017. Kemudian, tulisan ini menggunakan konsep Kantor & David (dalam Wolman dan Spitzley, 1996) yang mengatakan bahwa kepentingan bisnis yang paling menonjol dalam PEL adalah komunitas bisnis masyarakat kota khususnya bank, toko eceran, koran-koran, perusahaan besar, dan lain-lain yang memiliki investasi besar yang tetap dalam wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari praktek batik geblek renteng printing yang dilakukan oleh elit pengrajin batik dalam mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Selanjutnya, tulisan ini menggunakan konsep Niskanen (dalam Dewar, 1998) yang mengatakan bahwa birokrat harus memaksimalkan anggaran program PEL mereka untuk meningkatkan gaji, penghasilan tambahan dari kantor, reputasi publik, kekuasaan, perlindungan, dan penghasilan dari birokrasi. Dalam tulisan ini, hal tersebut dapat dilihat dari pendirian usaha batik dan pengambilalihan Asosiasi Pengrajin dan Pedagang Batik Kulon Progo yang dilakukan oleh birokrat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun jenis atau pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Alasan peneliti menggunakan studi kasus adalah karena secara metodologis, studi kasus berupaya mendekatkan kedalaman pemahaman atas sebuah atau beberapa tema (kasus) melalui kombinasi teknik dokumentasi, pencatatan, wawancara mendalam, kajian dokumen, maupun observasi sehingga mampu mendeskripsikan sebuah kasus dalam konteks lokasi dan waktu yang khas (Creswell 2007). Kasus yang diambil adalah hanya satu kasus saja yaitu di Kabupaten Kulon Progo. Adapun unit analisis yang dikaji adalah dinamika Pengembangan Ekonomi Lokal yang ada pada

UMKM batik geblek renteng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Kemudian yang menjadi objek penelitian adalah Pejabat/masyarakat yang terkait dengan pengembangan UMKM batik geblek renteng di Kulon Progo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Batik Geblek Renteng

Sekitar tahun 1980-1990an banyak penduduk Kulon Progo yang bekerja sebagai buruh batik di Kota Yogyakarta. Ketika produksi batik mulai berkurang di Kota Yogyakarta, para pekerja batik Kulon Progo banyak yang kembali ke rumahnya masing-masing. Sebagian dari mereka kembali ke desa untuk bertani bagi yang memiliki lahan pertanian. Namun, bagi mereka yang tidak bisa bertani dan tidak memiliki lahan pertanian, mereka tetap menjadi pembatik di rumah masing-masing (YS 24 Januari 2018) .

Keterampilan yang didapatkan para pembatik ketika masih bekerja di Kota Yogyakarta menjadi modal mereka untuk memproduksi batik sendiri di Kulon Progo. Meskipun demikian, pemasaran masih menjadi kendala utama bagi para pembatik. Hal ini dikarenakan promosi masih dari mulut ke mulut. Pemasaran batik masih sedikit dan ke tangan penjual yang ada di Bantul, Sleman, Yogyakarta.

Berbagai upaya dilakukan oleh pengrajin batik untuk meningkatkan penjualan batik mereka. Pada tahun 2008, para pengrajin dan pedagang batik membentuk sebuah asosiasi yang dinamakan APPBK (Asosiasi Pengrajin dan Pedagang Batik Kulon Progo). Di dalam asosiasi ini, para pengrajin dimotivasi untuk menjadi pengusaha batik yang mempunyai merk dan papan nama. Melalui asosiasi ini, para pengrajin batik bersama-sama membuat pasar batik yang lokasinya berpindah-pindah. Namun, penjualan batik tidak berjalan dengan mulus. Hal ini disebabkan oleh adanya persaingan dengan batik impor dari luar Kulon Progo (SS 29 Januari 2018).

Kebijakan Pemerintah Kulon Progo untuk mendukung para pengrajin batik saat itu memang ada. Pada tahun 2009, Pemerintah Kulon Progo membebaskan pajak iklan bagi para pengrajin batik Kulon Progo yang berlaku sampai tahun 2019. Tetapi, kebijakan terhadap distribusi batik belum terlalu jelas. Pada tahun 2009, APPBK pernah memohon kepada Pemerintah Kulon Progo untuk membuat surat edaran yang mewajibkan seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) memakai batik pada hari-hari tertentu. Permohonan tersebut memang dikabulkan, tetapi tidak serius dilakukan. Bupati Kulon Progo memberikan surat edaran, tetapi tidak secara besar-besaran dan tidak mengikat para PNS (SS 29 Januari 2018).

Pada tahun 2012, Hasto Wardoyo atau Hasto (Bupati Kulon Progo yang baru terpilih) menginisiasi sebuah program yang dinamakan dengan Bela Beli Kulon Progo. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Bela-Beli Kulon Progo adalah semangat pembelaan yang ditunjukkan oleh seluruh warga Kulon Progo dengan sebisa mungkin membeli produk lokal yang diproduksi di Kulon Progo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Hasto 29 Januari 2018). Salah satu program dari Bela Beli Kulon Progo ini adalah UMKM batik geblek renteng.

Batik geblek renteng adalah batik yang dihasilkan dari sebuah perlombaan desain batik pada tahun 2012 di Kulon Progo. Batik ini dijadikan sebagai batik khas Kulon Progo. Saat itu, seluruh peserta diminta untuk mengumpulkan desain batik. Setelah semua karya terkumpul, maka dilaksanakan proses penjurian dan pada akhirnya motif batik geblek renteng terpilih sebagai motif khas Kulon Progo.

Batik Geblek Renteng Sebagai PEL

Secara ruang lingkup besar, UMKM batik geblek renteng adalah bagian dari program Pemerintah Kulon Progo yang bernama Bela Beli Kulon Progo. Program Bela Beli Kulon Progo menekankan agar warga Kulon Progo membela Kulon Progo dengan cara membeli produk-produk lokal yang diproduksi di Kulon Progo. Tujuan utama pemerintah Kulon Progo menginisiasi UMKM batik geblek renteng adalah untuk memajukan industri batik dan meningkatkan ekonomi masyarakat Kulon Progo yang notabeneanya kelas kebawah (Hasto 29 Januari 2018).

Saat diwawancarai di kantornya, Hasto mengatakan bahwa Kulon Progo memiliki potensi yang besar untuk membangkitkan industri batik. Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa Kulon Progo memiliki sekitar 80 ribu jumlah siswa, 8 ribu jumlah PNS, dan 4 ribu jumlah perangkat desa. Oleh karena itu, Hasto mewajibkan seluruh perangkat pemerintahan dan siswa/i di Kulon Progo untuk memakai seragam batik geblek renteng.

UMKM batik geblek renteng sama dengan UMKM batik lainnya, termasuk tempat memproduksinya berada pada lokasi yang sama. Yang membedakan adalah motif batik geblek renteng dijadikan sebagai motif batik khas Kulon Progo yang kemudian dijadikan sebagai seragam wajib batik bagi perangkat desa, PNS dan siswa/i Kulon Progo.

Gambar 1
Baju Batik Geblek Renteng



Sumber: Dokumentasi Pribadi (12 Februari 2018)

Sejak Pemerintah Kulon Progo membuat kebijakan seragam wajib batik geblek renteng pada tahun 2012 di Kulon Progo, bisa dikatakan bahwa para pengrajin batik diberdayakan. Blakely (dalam Nel, 2001) mengatakan bahwa PEL menekankan pada pemberdayaan aspek lokalitas yang salah satu diantaranya adalah sumberdaya manusia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam skripsi Susilo (2017), para tenaga kerja pembatik di Kulon Progo berasal dari tetangga para kelompok pembatik.

Tabel 1
Daftar Kelompok Pengrajin Batik Kabupaten Kulon Progo
dan Jumlah Tenaga Kerja Mereka

Nama Kelompok	Tenaga Kerja	Nama Kelompok	Tenaga Kerja
Farras	80	Sinar Abadi Batik	18
Karina	20	Banyu Sambrang Batik	10
Darminto	25	Sekar Arum Batik	8
Barman Batik	8	Rina Batik	7
Estin Batik	18	Kartini Batik	9
Tingting Batik	11	Setian Batik	8
Yogo Batik	9	Suminten Batik	10
Sambayung Batik	10	Hariyanti Batk	12
Kencono Progo Batik	15	Dwi Batik	6
Sembung Batik	45	Tom Batik	10
Anugerah Batik	4	Sekar Batu Batik	5
Sutini	6	Batik Lily	4
Tumirah	7	Sekarniti Batik	10
Sugito	8	Batik Rahayu	12
Ponang	6	Annisa Batik	10
Thok Thil Batik	9	Sugeng Purwanto	10
Raharjo Batik	10	Partini Batik	4
Sugito	4	Batik Kembang	10
Manggala Batik	12	Menoreh Kyai Demang	4
Total		474	

Sumber: Disperindag ESDM Kabupaten Kulon Progo 2014 dalam Susilo 2017, h.79.

Dari tabel 1 di atas terlihat bahwa masing-masing kelompok pengrajin mempunyai karyawan. Kelompok Farras merupakan kelompok yang paling banyak mempekerjakan tetangganya sebagai pembatik, yaitu 80 orang. Sedangkan kelompok yang lain seperti Anugrah batik, Sugito, Batik Lily, Partini Batik, dan Menoreh Kyai Demang merupakan kelompok yang paling mempekerjakan tetangganya, yaitu masing-masing 4 orang.

Data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan juga menunjukkan bahwa batik geblek renteng memberikan pengaruh terhadap bertambahnya produksi batik di Kulon Progo. Pada

tahun 2011, jumlah produksi batik di Kulon Progo hanya berjumlah 20.200 potong dalam satu tahun. Setelah adanya kewajiban seragam batik geblek renteng pada tahun 2012, terjadi peningkatan jumlah produksi batik di Kulon Progo menjadi 36.933 potong dalam satu tahun. Hal yang sama terjadi pada tahun selanjutnya hingga pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah produksi batik yaitu menjadi 79.105 potong (lihat tabel II).

Tabel 2
Jumlah Produksi Batik dan Tenaga Kerja Pembatik di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Produksi Batik (Potong)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
2011	20.200	271
2012	36.933	327
2013	52.089	178
2014	67.245	474
2015	75.426	284
2016	79.105	310

Sumber: Dokumen Dinas Perdagangan Kulon Progo (29 Mei 2018)

Meskipun demikian, ada hal yang menarik untuk untuk dibahas lebih mendalam. Jika diperhatikan tabel II, jumlah tenaga kerja pembatik berfluktuasi dari tahun ke tahun dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Jumlah tenaga kerja pembatik hanya bertambah sebanyak 39 orang selama 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2011 (sebelum diwajibkan seragam batik geblek renteng) sebanyak 271 orang sampai tahun 2016 sebanyak 310 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM batik geblek renteng tidak serius dilakukan.

Politik Dibalik Pengembangan Ekonomi Lokal

1. Partisipasi yang Diabaikan

Sering sekali pengambilan keputusan dalam PEL tidak terbuka dan tidak partisipatori sehingga menimbulkan konflik meskipun konflik tersebut terjadi secara tersembunyi (Wolman dan Spitzley 1996). Hal yang sama terjadi pada proses pengambilan keputusan dalam memilih motif batik geblek renteng sebagai batik khas Kulon Progo yang kemudian digunakan untuk Pengembangan Ekonomi Lokal. Saat itu, para pengrajin batik tidak dilibatkan dalam memilih desain batik terbaik yang digunakan untuk batik khas Kulon Progo sehingga muncul konflik meskipun secara tersembunyi.

Ketika itu, Hasto (Bupati Kulon Progo) menunjuk Dinas Pariwisata Kulon Progo sebagai panitia perlombaan desain batik khas Kulon Progo. Panitia meminta para peserta untuk membuat desain motif batik yang bercirikan khas Kulon Progo di dalam sebuah kertas kemudian desain-desain tersebut dikirimkan kepada pihak panitia. Perlombaan ini melibatkan 304 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan menghasilkan 392 karya desain motif batik

(Attamami 2012). Setelah semua karya terkumpul maka dilaksanakan proses penjurian. Panitia mengundang para juri yang berasal dari birokrasi, seniman, perwakilan pengrajin batik, dan budayawan untuk menyeleksi desain batik yang telah diterima. Penjurian ini juga disaksikan oleh para pengrajin batik Kulon Progo (Sutedjo 12 Februari 2018).

Setelah desain motif batik semua terkumpul, maka dewan juri menyeleksi desain motif batik tersebut. Dengan alasan bingung yang disebabkan oleh banyaknya desain motif batik yang bagus dan bercirikan khas Kulon Progo, maka dewan juri melibatkan Hasto untuk ikut menentukan motif batik khas Kulon Progo. Akhirnya Hasto memilih motif batik geblek renteng sebagai motif batik khas Kulon Progo (SS 29 Januari 2018).

Para pengrajin batik Kulon Progo yang hadir menyaksikan pemilihan desain motif batik tersebut tidak dilibatkan untuk mengomentari desain motif batik yang terbaik padahal mereka mempunyai pilihan lain yang lebih bagus dan sesuai dengan konteks Kulon Progo. Salah seorang pengrajin batik Kulon Progo yang berinisial SS mengatakan bahwa para pengrajin batik Kulon Progo kaget dengan keputusan dari panitia perlombaan desain motif batik yang menyatakan bahwa pemenang lomba desain adalah desain batik geblek renteng. Padahal, menurutnya masih banyak desain motif batik lainnya yang lebih bagus dan sesuai dengan ciri khas Kulon Progo (SS 29 Januari 2018).

Ketika peneliti wawancara di kantornya, Hasto mengatakan bahwa motif geblek renteng dipilih karena ingin mengekspresikan satu makanan lokal Kulon Progo (makanan geblek) dalam bentuk karya seni kerajinan batik yang kemudian menimbulkan *multiplier effect* terhadap masalah ekonomi dan perdagangan yang ujungnya adalah membawa kesejahteraan bagi pengrajin batik (Hasto 29 Januari 2018). Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa makanan geblek tidak bisa mendatangkan *multiplier effect* secara ekonomi karena makanan tersebut terlalu lokal sehingga jika dibuat, mungkin yang bisa menikmati adalah hanya warga Kulon Progo. Oleh karena itu, makanan tersebut dijadikan sebagai motif batik khas Kulon Progo.

Tetapi apa yang dikatakan oleh Hasto justru berbeda dengan beberapa informan lain. Wawancara dari beberapa informan di lapangan mengatakan bahwa Hasto memilih motif batik geblek renteng karena motif tersebut berbentuk angka delapan dan memiliki makna yang sama dengan namanya "HASTO (Bahasa Jawa)" yang artinya adalah delapan. Berikut ini cuplikan wawancara dari beberapa informan.

"Itu kemarin diadakan lomba. Yang menjadi juara anak SMA kelas 2. Kebetulan pak hasto dan pak tedjo itu ada angkanya delapan. Entah tanggal lahir atau saudaranya ada delapan. Saya juga kurang faham. Dia melihat angka delapan itu dan motifnya geblek renteng, dia suka dan memilih." (Bayu 17 Januari 2018).

"Kamu searching aja, angka delapan itu kalau dalam bahasa jawa "HASTO". Nama bapak itu juga Hasto (Hasto Wardoyo)". (Dewantoro 26 Januari 2018).

Dari penjelasan di atas, ada dua hal yang menyebabkan Hasto memilih desain motif batik geblek renteng sebagai motif khas batik Kulon Progo. *Pertama*, motif tersebut berasal dari makanan khas Kulon Progo. Menurut penulis hal ini dilakukan oleh Hasto karena ingin

mendapatkan kesan yang baik di mata masyarakat. Hasto akan dianggap sebagai orang yang berjasa karena mampu membawa makanan khas Kulon Progo menjadi lebih bernilai dan memiliki ekonomi yang lebih tinggi. *Kedua*, motif batik geblek renteng mirip angka delapan dan memiliki makna yang sama dengan Hasto. Angka delapan tersebut akan memudahkan Hasto dalam membentuk memori kolektif masyarakat Kulon Progo agar mudah mengingat namanya hanya dengan simbol angka delapan.

Tidak dilibatkannya para pengrajin batik Kulon Progo dalam menentukan motif batik geblek renteng sebagai motif khas Kulon Progo menimbulkan konflik yang tersembunyi. Konflik ini ditandai dengan adanya perbedaan pendapat mengenai motif yang paling bagus sebagai motif batik khas Kulon Progo. Para pengrajin batik Kulon Progo mempunyai pilihan motif yang lain dan berbeda dengan motif batik geblek renteng yang dipilih oleh Hasto. Perbedaan pendapat tersebut tidak diungkapkan oleh para pengrajin batik Kulon Progo karena mereka hanyalah masyarakat biasa. Disamping itu, para pengrajin batik Kulon Progo juga tidak bisa mengkritisi motif batik geblek renteng yang dipilih oleh Hasto. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan para pengrajin batik Kulon Progo kepada Hasto dalam hal kebijakan mengenai batik yang akan dibuat oleh Hasto. Pemilihan desain motif batik geblek renteng akhirnya hanya formalitas saja dan dipilih berdasarkan preferensi Hasto.

2. Permainan Elit Pengrajin Batik & Birokrat

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kantor & David (dalam Wolman dan Spitzley, 1993) bahwa bank, toko eceran, koran-koran, perusahaan besar, dan lain-lain yang memiliki investasi besar dalam suatu kota memiliki kepentingan bisnis dalam PEL. Dalam konteks pengembangan UMKM batik geblek renteng di Kulon Progo, para elit pengrajin batik memiliki kepentingan ekonomi. Melihat adanya pengembangan batik geblek renteng di Kulon Progo, maka elit pengrajin batik memproduksi batik geblek renteng dengan teknik printing.

Pengrajin batik inisial YS mengatakan bahwa teknik printing dilakukan oleh elit-elit pengrajin batik Kulon Progo dengan melakukan kerjasama dengan pengrajin batik di luar Kulon Progo yang memiliki alat printing. Batik geblek renteng diproduksi di luar Kulon Progo dan dijual ke sekolah dengan harga yang lebih murah dan dalam jumlah yang banyak (YS 24 Januari 2018). Menurut YS, pemerintah Kulon Progo tidak konsisten dengan janji mereka yang telah disepakati bersama agar memberikan denda terhadap orang yang melakukan batik printing (YS 24 Januari 2018). Informasi dari pengrajin batik lain yang berinisial SS mengatakan bahwa salah satu orang yang memelopori batik printing adalah saudaranya Hasto (SS 29 Januari 2018).

Pengembangan UMKM batik geblek renteng menjadi momen penting bagi elit pengrajin batik untuk memaksimalkan produksi batik mereka. Hal ini disebabkan sasaran distribusi batik geblek renteng sudah jelas yaitu anak sekolah yang jumlahnya bisa dikatakan banyak di Kulon Progo. Untuk memaksimalkan produksi batik ini diperlukan satu teknik membuat yang dinamakan teknik printing.

Teknik printing dilakukan hanya dengan mengkopi motif batik yang sudah ada polanya. Teknik ini dapat menyelesaikan produksi batik dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang besar. Hal ini berbeda dengan teknik batik lukis dan batik cap yang pada

umumnya lebih lambat dalam memproduksi batik. Harga batik printing juga lebih murah dibandingkan dengan batik cap dan batik tulis sehingga banyak peluang bagi elit pengrajin untuk menjual batik printing geblek renteng khususnya di sekolah. Dengan maksimalnya produksi batik geblek renteng dan distribusi yang jelas, maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang maksimal pula.

Kekuatan yang dimiliki oleh para elit pengrajin batik Kulon Progo baik berupa modal usaha maupun mitra dari luar Kulon Progo, turut andil memberikan kesempatan bagi para elit pengrajin batik Kulon Progo untuk memproduksi batik printing. Modal usaha yang dimiliki bisa dimanfaatkan untuk membayar jasa printing batik yang dilakukan oleh mitra yang berasal dari luar Kulon Progo. Kerjasama dengan mitra luar Kulon Progo akan meminimalisir informasi keberadaan batik printing di Kulon Progo.

Tidak hanya elit pengrajin batik Kulon Progo, beberapa birokrat Kulon Progo juga andil dalam memanfaatkan peluang UMKM batik geblek renteng. Arnold (dalam Dewar, 1998) mengatakan bahwa selain pembuatan program sebagai tujuan utama birokrat, beberapa birokrat mencari jaminan anggaran agar anggaran tidak minim untuk beberapa tahun kedepannya. Selain itu, para birokrat harus memaksimalkan anggaran program untuk meningkatkan gaji, penghasilan tambahan dari kantor, reputasi publik, kekuasaan, dan perlindungan (Niskanen dalam Dewar, 1998).

Dalam konteks pengembangan UMKM batik geblek renteng, birokrat Kulon Progo memperoleh keuntungan dengan membuka usaha batik sebagai usaha sampingan. Tidak hanya mendirikan usaha batik, ada juga birokrat Kulon Progo yang mengambilalih dan berperan sebagai ketua Asosiasi Pengrajin dan Pedagang Batik Kulon Progo (APPBK) yang sebelumnya didirikan oleh para pengrajin batik Kulon Progo (SS 29 Januari 2018).

Pengrajin YS mengatakan bahwa momen UMKM batik geblek renteng digunakan oleh birokrat Kulon Progo untuk memperoleh keuntungan. Birokrat Kulon Progo mendirikan usaha batik agar teman-teman dari dinas-dinas pemerintahan membeli batik kepada birokrat Kulon Progo. Selain itu, birokrat Kulon Progo juga mengkoordinir pesanan yang berasal dari dinas-dinas pemerintahan. Oleh karena itu, Pengrajin YS mengatakan bahwa pembagian pesanan batik geblek renteng tidak adil (YS 24 Januari 2018).

Beberapa birokrat Kulon Progo memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dalam UMKM batik geblek renteng. Hal tersebut dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mendirikan usaha batik dan mengambilalih Assosiasi Pengrajin dan Pedagang Batik Kulon Progo. Mendirikan usaha batik tentu saja memudahkan birokrat untuk mendapatkan pesanan seragam batik geblek renteng. Hal ini disebabkan oleh posisi birokrat merupakan bagian dari pemerintahan yang tentu saja memiliki akses terhadap konsumen batik geblek renteng yang ada di pemerintahan. Kedekatan antara sesama birokrat yang sudah lama saling mengenal akan menguntungkan. Ketika ada pesanan seragam batik yang biasanya secara kolektif dari kantor pemerintahan, kemungkinan besar birokrat yang memiliki usaha batik akan mendapatkan pesanan dari rekan sesama birokrat.

Pengambilalihan Assosiasi Pengrajin dan Pedagang Batik Kulon Progo memberikan peluang untuk dijadikan sebagai alat kontrol oleh birokrat. Ketika berperan sebagai ketua asosiasi, secara otomatis birokrat akan memiliki kesempatan untuk mengorganisir anggota-

anggotanya. Hal yang sama terjadi ketika mendapatkan pesanan seragam batik dari pemerintahan. Secara otomatis birokrat yang berperan sebagai ketua Asosiasi Pengrajin dan Pedagang Batik Kulon Progo akan mengorganisir berapa potong yang harus diproduksi oleh anggota-anggotanya. Hal ini memungkinkan bagi birokrat untuk mendapatkan porsi pesanan yang lebih besar karena posisinya sebagai ketua organisasi dan sekaligus bagian dari pemerintahan.

Sasaran pengembangan UMKM batik geblek renteng yang lebih dominan menguntungkan elit pengrajin dan birokrat tentu sangat merugikan pengrajin batik kecil. Pesanan seragam yang dimonopoli birokrat dan elit pengrajin akan mengurangi kesempatan bagi pengrajin batik kecil untuk memproduksi batik geblek renteng. Meskipun ada banyak jumlah siswa/siswi maupun pegawai pemerintahan di Kulon Progo yang menggunakan batik geblek renteng, mungkin hanya beberapa potong saja yang bisa diproduksi oleh pengrajin batik kecil sehingga UMKM batik geblek renteng hanya memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap peningkatan ekonomi mereka. Birokrat dan elit pengrajin seharusnya mendorong kemajuan Pengembangan Ekonomi Lokal dalam rangka mengatasi kemiskinan. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya yang justru mendominasi program PEL.

3. Batik Geblek Renteng untuk Sang Bupati

Dalam konteks pengembangan UMKM batik geblek renteng, Bupati Kulon Progo (Hasto) berkepentingan untuk mendapatkan dukungan elektoral. Elkin (dalam Wolman dan Spitzley, 1993) berargumen bahwa pejabat-pejabat kota percaya bahwa prospek elektoral mereka akan meningkat jika mampu menjaga reputasi mereka. Reputasi tersebut diraih dengan cara mempromosikan kebijakan inovatif dan melakukan aktifitas-aktifitas yang dilihat publik.

3.1 Membangun *Good Image*

Sebagai Bupati Kulon Progo, Hasto selalu menunjukkan bahwa Kulon Progo harus melakukan yang terbaik untuk pengembangan batik. Dari data sekunder berupa siaran Net News yang diakses pada tanggal 10 Juli 2018 di *Youtube* dengan judul “Satu Indonesia: Bersama Hasto Wardoyo, Bupati Kulon Progo”, Hasto dengan antusias menjelaskan bahwa Kulon Progo memiliki batik khas yakni batik geblek renteng.

Sambil mengelus dadanya, Hasto mengatakan bahwa dia sakit hati melihat warganya membeli batik dari Tanah Abang setiap tahun ajaran baru. Menurut Hasto, warga Kulon Progo mempunyai kemampuan untuk memproduksi batik sehingga tidak perlu membeli batik printing dari Tanah Abang yang produk batiknya berasal dari luar Indonesia. Oleh karena itulah Hasto mengembangkan batik di Kulon Progo. Sesekali ditampilkan klip dokumentasi para pengrajin yang sedang mengerjakan batik geblek renteng yang memiliki warna yang beragam.

Gambar 2
Hasto (Kiri) Diwawancarai oleh Pewawancara Net News



Sumber: Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=0ki2L547jp8>
(diakses pada 10 Juli 2018).

Tidak hanya itu, Hasto juga sering memakai baju batik geblek renteng di berbagai acara. Salah satu diantaranya adalah acara yang disiarkan oleh Kompas TV yang diakses pada tanggal 10 Juli 2018 di *Youtube* dengan judul “Bupati Kulon Progo: *The Interview with Tukul Arwana*”. Pada acara tersebut, Hasto tampak menggunakan batik geblek renteng dengan latarbelakang berwarna merah. Ketika ditanya oleh Tukul Arwana yang saat itu sebagai pembawa acara, Hasto menjelaskan bahwa Kulon Progo mempunyai potensi pasar batik geblek renteng yang bagus karena ada sekitar 80 ribu siswa/i dan 8000 PNS di Kulon Progo sebagai konsumen batik geblek renteng. Oleh sebab itu, Hasto membuat seragam wajib batik geblek renteng yang dipakai setiap hari Kamis.

Gambar 3
Hasto (Kanan) Saat Berbicara di Acara *The Interview with Tukul Arwana*



Sumber: Youtube <https://www.youtube.com/watch?v=WlbiD9S2pNU>
(diakses 10 Juli 2018).

Penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Hasto mengenai batik geblek renteng tentu akan memberikan pengaruh kepada publik. Hal tersebut akan

menimbulkan kesan bahwa Hasto adalah promotor batik geblek renteng dan inovator batik yang mampu membawa perubahan.

3.2 Simbol dan Batik sebagai Alat Politik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa motif geblek renteng yang berbentuk angka 8 memiliki makna yang sama dengan nama Hasto. Seiring perkembangan waktu, eksistensi Hasto diperkuat dengan memajang simbol angka delapan yang tidak hanya pada kain saja, tetapi juga dipajang di tempat umum. Ketika di lapangan, peneliti menemukan berbagai tempat umum yang digunakan sebagai pemajangan angka delapan adalah seperti dinding sekolah, vas bunga jalan raya, halte, pasar, kantor pemerintahan dan beberapa tempat umum lainnya.

Gambar 4

Halte Sebagai Tempat Pemasangan Motif Geblek Renteng



Sumber: Dokumentasi Pribadi (12 Februari 2018)

Seorang guru berinisial SN mengatakan bahwa ketika akan melakukan akreditasi di sekolah tempatnya mengajar, maka para guru bersiap-siap untuk memasang simbol “8” di sekitar sekolahnya seperti gerbang sekolah, pagar, dan lain-lain. SN mengatakan bahwa hal ini tidak hanya di sekolahnya, tetapi juga di sekolah lain yang ada di Kulon Progo. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari SN, pemasangan simbol Hasto menjadi salah satu kriteria penilaian dalam akreditasi (SN 12 Februari 2018). Selain sebagai simbol kekuasaan yang dipajang melalui tempat umum, Hasto juga menggunakan Batik geblek renteng untuk kampanye pemilihan kembali kepala daerah tahun 2017 di Kulon Progo. Berikut cuplikan wawancara dengan seorang pengrajin batik di Kulon Progo.

“Pak Hasto sering dan meski memakai batik geblek renteng termasuk pada waktu kampanye itu. Apalagikan mau membuat bandara itu dipersiapkan batik untuk dijual disana. Waktu kampanye itu batik geblek sering ditunjukkan.” (Sugito 12 Februari 2018)

Batik geblek renteng juga dimanfaatkan oleh Hasto pada saat debat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017. Dalam debat yang ditayangkan oleh TVRI Yogyakarta yang diakses dari *Youtube* pada tanggal 10 Juli 2018, tampak

bahwa baju batik geblek renteng tidak hanya digunakan oleh Hasto tetapi juga para pendukung dan wakilnya. Berbeda dengan lawan politik Hasto menggunakan baju warna putih. Dari sini bisa kita katakan bahwa jika batik geblek renteng adalah batik khas Kulon Progo, seharusnya lawan politik Hasto juga menggunakan batik geblek renteng. Namun hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh lawan politik Hasto karena Hasto yang telah diketahui oleh warga Kulon Progo sebagai inisiator batik geblek renteng.

Gambar 5
Para Pendukung Hasto dalam Acara Debat Publik
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Diliput TVRI Yogyakarta



Sumber: Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=S_-FurEvnjE
(diakses 10 Juli 2018)

Batik geblek renteng akhirnya menjadi alat yang bisa digunakan oleh Hasto untuk kepentingan elektoralnya sehingga Hasto terpilih kembali menjadi Bupati Kulon Progo pada tahun 2017. Kepentingan politik Hasto terhadap UMKM batik geblek renteng akan memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan UMKM tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan mengatakan bahwa batik geblek renteng tidak diminati oleh konsumen. Hal ini disebabkan oleh motif batik geblek renteng yang berupa angka delapan terlalu kaku sehingga tidak memiliki keindahan bagi konsumen. Berikut cuplikan wawancara dengan pengrajin batik geblek renteng Kulon Progo (SS 29 Januari 2018).

Sebagai bagian dari Pengembangan Ekonomi Lokal, batik geblek renteng mungkin memberikan sedikit kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Batik geblek renteng mungkin akan dibeli oleh anak sekolah dan pegawai pemerintahan, namun hanya sekedar melepaskan kewajiban untuk menaati peraturan Pemerintah Kulon Progo. Batik geblek renteng tidak memiliki daya saing yang mampu untuk mengangkat perekonomian Kabupaten Kulon Progo.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa berbicara mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) tidak hanya semata-mata bicara tentang manajemen dan administrasi. Dalam PEL, terdapat pengambilan keputusan dan partisipasi yang membutuhkan proses politik. Dalam kajian ini, hal tersebut dibuktikan dengan pengambilan keputusan terhadap pemilihan desain motif batik geblek renteng sebagai motif batik khas Kulon Progo yang dijadikan sebagai PEL di Kulon Progo. Pengambilan keputusan tersebut didominasi oleh Bupati Kulon Progo tanpa mempertimbangkan pendapat para pengrajin batik Kulon Progo.

Selain itu, hal yang paling penting adalah PEL tidak hanya berbicara tentang peningkatan ekonomi, tetapi juga berbicara mengenai kepentingan. Dalam konteks pengembangan UMKM batik geblek renteng, memang tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian para pengrajin batik dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tetapi, pengembangan UMKM batik geblek renteng juga sarat dengan kepentingan para elit. Hal ini terbukti dengan adanya kepentingan politik Bupati Kulon Progo, dan kepentingan ekonomi birokrat dan para elit pengrajin batik.

Kepentingan Bupati Kulon Progo adalah untuk mendapatkan dukungan elektoral pada pemilihan kembali Bupati Kulon Progo tahun 2017. Cara yang dilakukan oleh Bupati Kulon Progo sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Elkin. Dalam PEL, Elkin (dalam Wolman dan Spitzley, 1993) menyatakan bahwa prospek elektoral pejabat-pejabat kota akan meningkat jika mereka mampu menjaga reputasi mereka dengan cara mempromosikan kebijakan inovatif dan melakukan aktifitas-aktifitas yang dilihat publik. Sementara itu, untuk mendapatkan dukungan elektoral, Bupati Kulon Progo tidak hanya mempromosikan kebijakan batik geblek renteng di depan publik, tetapi juga menggunakan simbol kekuasaannya melalui motif geblek renteng (angka delapan) yang dipajang di tempat-tempat umum.

Kepentingan Birokrat Kulon Progo dalam pengembangan UMKM batik geblek renteng adalah mendapatkan keuntungan ekonomi. Keuntungan ekonomi tersebut dilakukan birokrat dengan cara ikut sebagai pelaku ekonomi pada pengembangan UMKM batik geblek renteng dan mengambilalih asosiasi pengrajin batik. Hal ini juga sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Niskanen dalam politik Pengembangan Ekonomi Lokal. Niskanen (dalam Dewar, 1998) menyatakan bahwa para birokrat harus mempertahankan program dan memaksimalkan anggaran program PEL untuk meningkatkan gaji, penghasilan tambahan dari kantor, reputasi publik, kekuasaan, dan perlindungan.

Sama halnya dengan birokrat, elit pengrajin batik Kulon Progo juga mempunyai kepentingan ekonomi yang dilakukan dengan memproduksi batik geblek renteng printing. Hal ini juga dikatakan oleh Kantor & David (dalam Wolman dan Spitzley, 1993) bahwa bank, toko eceran, koran-koran, perusahaan besar, dan lain-lain yang memiliki investasi besar dalam suatu kota memiliki kepentingan bisnis dalam PEL. Tetapi, mengenai proses bekerjanya kepentingan pengusaha tidak dijelaskan oleh Kantor & David.

Hal yang menarik dari penjelasan kepentingan para elit adalah bahwa bagaimana bekerjanya kepentingan para elit pada pengembangan UMKM batik geblek renteng berbeda dengan konsep kepentingan elit pada politik PEL. Bahkan Kantor & David tidak menjelaskan bagaimana proses bekerjanya kepentingan pengusaha terhadap PEL. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik PEL adalah bervariasi, tergantung dari kondisi masing-masing tempat dimana PEL itu berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Lincolin. (2005). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Attamami, Masduki. (2012, May 09). "Geblek Renteng", Juara Pertama Lomba Desain Batik. *Jogja Antanews*. Diakses dari <https://jogja.antaranews.com/berita/300110/geblek-renteng-juara-pertama-lomba-desain-batik>.
- Chazali, Chairina. 2017. *Mengembangkan Institusi Ekonomi Perdesaan: Belajar dari Pengalaman dalam Potret Politik & Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan*, A.Zakaria (ed), Yogyakarta: IRE. Diakses dari <https://ireyogya.org/uploads/Buku%20Potret%20Politik%20dan%20Ekonomi%20Lokal%20di%20Indonesia%20120517%20SIAP%20CETAK%20OK.pdf>.
- Creswell, John W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Thousand Oaks. California: SAGE Publications.
- Dewar, E. Margaret. (1998). Why State and Local Economic Development Programs Cause So Little Economic Development. *Journal of Economic Development Quarterly*, 12(1). Diakses dari <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/089124249801200106>.
- Luly, L.W., 2009, *Pelembagaan Local Economic Development: Studi Kasus Program Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (BPEM) di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, tesis tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Prodi Ilmu Politik Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada.
- Murphy, et.al. (2006). *Local Economic Development: a Primer Developing and Implementing Local Economic Development Strategies and Action Plans*. Washintong DC. Diakses dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/763491468313739403/pdf/337690REVIS-ED0ENGLISH0led1primer.pdf>.
- Nariswari, S.L. (2016, April 22). *Batik Kulon Progo Semakin Dekat di Hati Masyarakat, Semakin Menarik Minat Daerah Sahabat*. *Harian Jogja*. Diakses dari <http://m.harianjogja.com/baca/2016/04/22/batik-kulonprogo-semakin-dekat-di-hati-masyarakat-semakin-menarik-minat-daerah-sahabat-712924>.

- Nel, Etienne. (2001). Local Economic Development: A Review and Assessment of its Current Status in South Africa. *Journal of Urban Studies*, 38 (7), 1003-1024. Diakses dari <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/00420980120051611>.
- Pahlawan, R., 2014, Upaya Peningkatan Daya Saing Pasar Terapung Muara Kuin Sebagai Modal Pengelolaan Local Economic Development (LED), tesis tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Prodi Ilmu Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 296 Tahun 2012 tentang Motif Batik Geblek Renteng sebagai Batik Khas Kulon Progo. Diakses dari <http://jdih.kulonprogokab.go.id/jdih/getfile.php?id=1010&file=SK-296-2012.pdf>.
- Susilo, E.G.B., 2017, Kajian Implementasi “Bela-Beli Kulon Progo” (Kasus: Air-Ku, Batik Geblek Renteng, dan Tomira), skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Wolman dan Spitzley. (1996). The Politics of Local Economic Development. *Journal of Economic Development Quarterly*, 10(2),115-150. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/240277354_The_Politics_of_Local_Economic_Development.